

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten **Indragiri Hilir** resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 (LN RI No. 49). Kabupaten Indragiri Hilir dengan Ibu Kota di Tembilahan disebut dengan "*Negeri Seribu Jembatan*" karena daerahnya terdiri dari perairan, sungai, rawa-rawa, dan perkebunan kelapa dipisahkan oleh ribuan Jembatan.

Secara geografis, daerah ini berada pada posisi 0° 36' LU, 1° 07' Ls dan antara 102° 32' dan 104° 10' BT, terletak dibagian timur provinsi Riau dengan daerah seluas 11,605.97 km², lautan 6,318 km dan perairan umum 888.97 km² yang berbatasan dengan daerah sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Pelalawan
- Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi
- Barat : Kabupaten Indragiri Hulu
- Timur : Kabupaten Kepulauan Riau

Jumlah penduduk kabupaten Indragiri Hilir mencapai 639.330 jiwa yang terdiri dari sejumlah suku/ etnik, seperti Banjar dari Kalimantan, Bugis dari Sulawesi, dan Melayu dari Jambi. Sementara ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir pada sektor perkebunan yang meliputi Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, dan Kehutanan. Berdasarkan aktifitas bisnis / sumber kehidupan, Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indragiri Hilir terdiri dari 69.01% sector pertanian 8.58%, pelayanan 7.74%, perdagangan 1.54% industri dan yang lain-lain 1.54%. Luas areal untuk sector pertanian 160,637 Ha sementara sector perkebunan memiliki lahan seluas 454,831 ha. Daerah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki iklim tropis basah dengan curah hujan tertinggi 1.300 mm.

Secara umum, kondisi tanah teridir dari tanah gambut dan rawa-rawa yang sangat potensial untuk perkebunan Kelapa hybrida, itulah sebabnya kabupaten Indragiri Hilir berperan sebagai gudang kelapa di Provinsi Riau. Posisi Indragiri Hilir yang sedemikian rupa memainkan peran yang sangat strategis untuk masa depan karena daerah ini juga didukung oleh 3 pelabuhan yang diperuntukan bagi aktifitas ekspor lintas batas yaitu di Pelabuhan Sungai Guntung dan Kuala Enok.

4.2. Gambaran Umum Kecamatan Keritang

4.2.1. Geografis

Kecamatan Keritang adalah salah satu dari 20 Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 697,47 Km² atau 69,747 Ha yang dibentuk sebagai aktualisasi dari PP Nomor : 14 Tahun 1981, dimana merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Reteh dengan ibukotanya Kotabaru yang terdiri dari 19 desa, Kemudian pada tahun 2000 telah terjadi pemekaran desa sehingga bertambah menjadi 24 desa.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : 376/Tahun 1997 tanggal 29 Juli 1997 dan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor 82/V/HK-2001, tanggal 25 Mei 2001 Kecamatan Keritang dimekarkan menjadi 2 Kecamatan masing-

masing Kecamatan Keritang yang terdiri dari 13 Desa dan Kecamatan Kemuning (sebelumnya adalah Kecamatan Pembantu Kemuning di Selensen) Sebanyak 11 desa.

Secara Administrasi Kecamatan Keritang terdiri dari 13 (tiga belas) Desa yaitu Desa kota baru Reteh, Desa seberang Pabenaan, Desa Nusantara Jaya, Desa Kembang, Desa Keritang, Desa Kuala Lemang, Desa Teluk Kelasa, Desa Pengalaihian, Desa Pancur, dan Desa Selancar. Berdasarkan Data Statistik Tahun 2008 Penduduk di Kecamatan Keritang berjumlah 60,610 jiwa. Jika dilihat dari jumlah penduduk dan luas wilayah Kecamatan Tembilahan maka terdapat kepadatan penduduk sebanyak 31 Jiwa per Km².

Tinggi pusat pemerintah wilayah Kecamatan Keritang dari permukaan laut adalah 6 hingga 35 meter. Keadaan tanahnya yang sebagian besar berupa daerah berbukit-bukit yang terdapat dibagian Selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang yang berbatasan dengan Provinsi Jambi. Keadaan tanahnya yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut maka daerah ini digolongkan sebagai daerah beriklim tropis basah dengan udara lembab.

Tabel 4.1. Daftar Luas Wilayah Desa/Kelurahan Kecamatan Keritang Tahun 2012

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Kotabaru Reteh	45,10
2	Seberang Pebenaan	36,75
3	Pebenaan	48,35
4	Nusantara Jaya	48,80
5	Kembang Mekar Sari	36,65
6	Kotabaru Seberida	37,20
7	Pasar Kembang	36,30
8	Kuala Keritang	77,39
9	Kuala Lemang	81,75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

10	Teluk Kelasa	37,50
11	Pengalihan	77,15
13	Sencalang	24,53
15	Lintas Utara	35,50
16	Nyiur Permai	27,43
17	Petalongan	45.00
Jumlah		797,47

Sumber : Kantor Camat Keritang 2014

4.2.2. Pemerintahan

Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna pemerintah telah mengadakan penataan kembali struktur organisasi pola minimal sesuai dengan *Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor : 218 Tahun 1997 Dan Keputusan Mendagri Nomor : 20 Tahun 1997* tentang Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Camat Keritang dibantu oleh Sekretaris Camat, 5 Kasi (Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan Umum, Kasi TranTip, Kasi Sosial dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan) dengan 6 Kasubag dan 2 Kaur serta beberapa Instasi Vertikal yang ada diwilayah Kecamatan Keritang.

Pada Tahun 2011, Kecamatan Keritang mengalami pemekaran desa sesuai dengan Perda No.06 Tahun 2011. Jumlah Desa menjadi 17 Desa yaitu ;

1. Desa Kotabaru ReteH
2. Desa Seberang Pebenaan
3. Desa Pebenaan
4. Desa Nusantara Jaya
5. Desa Kembang Mekar Sari
6. Desa Kotabaru Seberida

7. Desa Pasar Kembang
8. Desa Kuala Keritang
9. Desa Kuala Lemang
10. Desa Teluk Kelasa
11. Desa Pengalihan
12. Desa Pancur
13. Desa Sencalang
14. Desa Kayu Raja
15. Desa Lintas Utara
16. Desa Nyiur Permai
17. Desa Petalongan

Keritang :

No	Nama Camat	Periode
(1)	(2)	(3)
1.	Drs.Abd. Hamid Idris	11/12/1981 s/d 16/10/1982
2.	Najaruddin,BA	16/10/1982 s/d 26/05/1983
3.	Drs.M.Fikri Mursyid	26/05/1983 s/d 22/01/1985
4.	Drs.Jailani Sabrah	22/01/1985 s/d 16/11/1985
5.	Drs.Akhmad	16/11/1985 s/d 16/10/1986
6.	Drs.Subroto	16/10/1986 s/d 03/05/1989
7.	Drs.Ilyas Harun	03/05/1989 s/d 05/02/1996
8.	Drs.Said Ismail	05/02/1996 s/d 22/03/2003
9.	Drs.Darussalam	22/03/2003 s/d 27/12/2004
10.	Yun Hawarius,S.Sos	27/12/2004 s/d 14/10/2010
11.	Ahmad Ramani,SPD M.pd	14/10/2010 s/d Sekarang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 4.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Honorer yang Bertugas Menurut Instansi di Kecamatan Keritang Tahun 2012

No	Badan/Instansi/Kantor	Jumlah	
		PNS	Honorer
1	Kantor Camat Keritang	14	6
2	Kantor Desa/Kelurahan	12	92
3	Kantor Polsek	24	-
4	Kantor Koramil	9	-
5	Kantor Urusan Agama	6	2
6	UPT Puskesmas Kotabaru	19	24
7	UPT Diknas	6	1
8	UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perterknakan	2	1
9	UPT Perhubungan	3	7
10	UPT Kependudukan	2	8
11	Kantor Pos dan Giro	2	-
12	Kantor PLN	3	9
13	Kantor Pdam	5	-
14	Koordinator Statistik Kecamatan	1	-
15	UPT Puskesmas Kotabaru	-	-
16	UPT BP2KP	16	4
17	UPT Perkebunan	2	-
18	UPT Dispenda	1	1
Jumlah		155	109

Sumber : Kantor Camat Keritang 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang Bertugas di Kecamatan Keritang Menurut Pendidikan Tertinggi yang di Selesaikan tahun 2012

No	Jumlah	Banyaknya
(1)	(2)	(3)
1. SD		-
2. SLTP		1
3. SLTA		22
4. D1/D2/D3		-
5. S1/S2/S3/		3
Jumlah		26

Sumber : Kantor Camat Keritang 2014

4.2.3. Penduduk

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu wilayah dan sangat menentukan kelancaran dan keberhasilan pembangunan. Penduduk asli daerah Indragiri Hilir adalah suku Melayu.

Penduduk kecamatan keritang pada tahun 2012 adalah 64.029 jiwa. Rata-rata rumah tangga adalah 4 jiwa. Desa yang paling banyak penduduknya adalah Desa Kotabaru Seberida yaitu 8.855 jiwadan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Desa Kembang Mekar Sari yaitu 2.504 jiwa.

Sex Ratio Kecamatan Keritang adalah 103 (diatas 100) menunjukan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 32.549 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 31.450 jiwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.Keberadaan Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir

a. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah

Sejalan dengan berdirinya kabupaten indrgiri hilir maka diperlukan perkembangan ke depan, oleh kerean itu Pemerintah Daerah mendirikan sebuah Kantor yang mengurus masalah pungutan penghasilan daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah. Kegiatan pembangunan didaerah yang merupakan salah satu tugas pokok pemerintah daerah sebagai perwujudan kegiatannya yaitu otonomin yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab, maka pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hili perlur memandang adanya kesarian dalam pengumpulan dana untuk membiayai pembangunan daerah,

Pada awal berdirinya kantor Dinas Pendapatan Daerah masih bergabung dengan bagian keuangan dan kas Daerah Kabupaten Indargiri Hilir dan berada dalam satu atap dengan Kantor Bupati Daerah Tingkat II Indargiri Hilir. Seiring kemajuan perkembangan pembangguna dan tuntutan tugas maka Dinas Pendapatan Daerah mulai berdiri sendiri.

Pada saat Dinas Pendapatan Daerah berdiri sendiri di bawah pimpinan bapak H. Usman Fu'ad. Lebih kurang 40 tahun berjalanya Dinas Pendapatan Daerah, pada pertengahan bulan juli 2005 berpindah ke jl. Hang tuah no 04 Tembilahan yaitu gedung Inhil Business Center yang di bangun mulai tahun 2003.

Adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada table dibawah ini adalah:

**Tabel 4.5. Nama-Nama Yang Pernah Menjabat Sebagai Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir**

NO	NAMA	MASA JABATAN
1	H. Usman Fu'ad	1975-1980
2	Yuda Yahaya, BA	1981-1985
3	Drs. Alibun siregar	1986-1990
4	Drs. Jaelani sbrah	1991-1996
5	Drs. Nazarudin ahmad	1996-2000
6	Drs. Indra bangsawan	2001-2004
7	Drs. Said sirifuddin	2005-2007
8	Drs. Husni hasan	2007-2009
9	H. Edy syafwannur, SE.MP	2008-2010
10	Drs. H.A. rasid. HZ	2010-2014
11	H Fazar Husein SH	2014 sampai sekarang

Sumber, Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir 2014

b. Visi Dan Misi Dinas Pendapatan

Visi Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Indragiri Hilir adalah **“terwujudnya penerimaan pendapatan daerah yang optimal”** sedangkan Misinya adalah :

1. Meningkatkan kinerja aparatur Dinas Pendapatan Daerah melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan kelengkapan data serta pengkajian potensipenerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Sumber Daya Alam yang dimiliki.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Meningkatkan kesejahteraan aparatur di lingkungan dinas pendapatan daerah kabupaten indragiri hilir
5. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah secara profesional.
6. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk kepentingan peningkatan pendapatan asli daerah
7. Meningkatkan penegakan supremasi hukum baik terhadap aparatur maupun terhadap wajib pajak dan wajib retribusi .

c. Tujuan Dan Sasaran Dinas Pendapatan Daerah

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi dari Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana yang dilakukan. maka perlu dijabarkan keadaan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perbuatan tujuan dan sasaran operasional, tujuan Dinas Pendapatan Daerah adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah
2. Meningkatkan akuntabilitas publik pemerintah
3. Meningkatkan kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik
4. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan pemerintah dan belanja pembangunan.

sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif sehingga dapat diukur apa yang dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. sasaran yang ingin dicapai Dinas Pendapatan Daerah itu adalah :

1. Meningkatkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
4. Adanya data-data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah yang akurat
5. Meningkatkan akuntabilitas publik
6. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penerimaan pendapatan asli daerah

d. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah

berdasarkan peraturan daerah kabupaten indragiri hilir nomor 15 tahun 2004 tugas pokok dan fungsi dinas pendapatan kabupaten indragiri hilir adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendapatan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang anggaran pendapatan daerah
2. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pendapatan daerah
3. Pengembangan upaya upaya peningkatan pendapatan
4. Perumusan pendapatan serta penetapan penerimaan
5. Penyusunan data dan informasi di bidang pendataan dan penerimaan daerah
6. Pelaksanaan, penagihan, pembukuan dan verifikasi

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Penagihan dan perhitungan serta restitusi
8. Penyelesain keberatan/gugatan
9. Penatausahaan retribusi dan pendataan lain lain
10. Pelaksanaan inventarisasi dan pembukauan benda dan barang keutuhan
11. Penetapan dan penagiha pajak non pajak
12. Pengakajian upaya-upaya penigkatan pendapatan
13. Pengembangan sistem informasi keuanagan dan metode pendapatan daerah
14. Pelaksanaan administrasi umum, menyusun program, keuangan kepegawaian dan perlengkapan
15. Pengelolaan unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD)

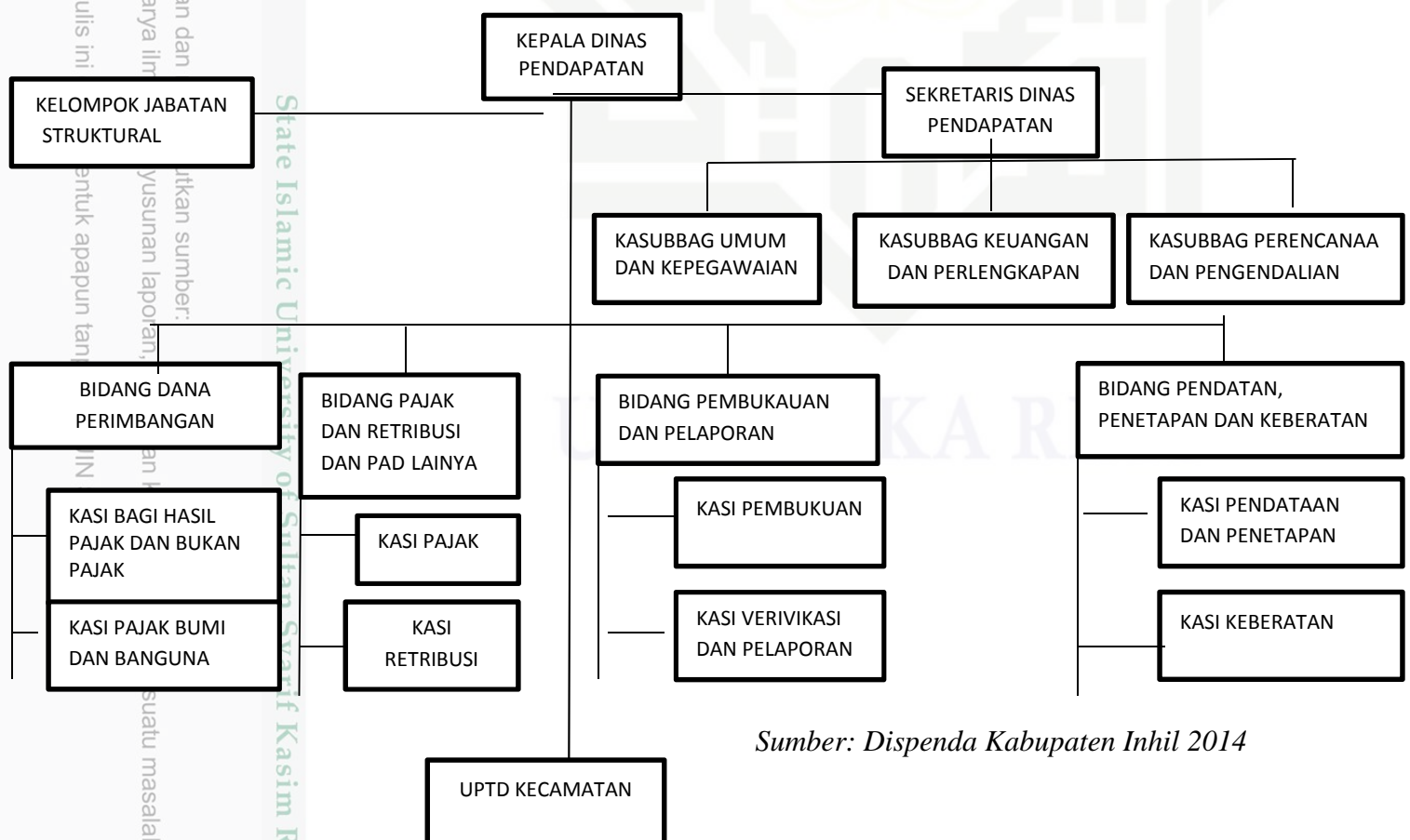
Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas dinas pendapatan kabupaten indragiri hilir mempunyai wewenag sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang pendapatan.
2. Penelitian dibidang pendapatan daerah yang mencakup wilayah kabupaten dibidang pendapatan
3. Menyusun kebijakan teknis dan program
4. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah
5. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah
6. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan peningkatan pendapatan

7. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembanguna di bidang pendapatan daerah
8. Penyelenggaraan dan pengawasan standar minimal dalam bidang pendapatan daerah
9. Penyusunan rencana program d biang pendapatan
10. Penyelenggaraan sistem pendapatan daerah
11. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan pelatihan di bidang pendapatan daerah.

e. Struktur Organisai Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasrkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :



Sumber: Dispenda Kabupaten Inhil 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin kegiatan dinas baik administratif maupun operasional sesuai dengan tugas pokok fungsi dan wewenang dinas
2. Sub Bagian Sekretariat yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan administrasi dan urusan umum, program, keuangan kepegawaian dan urusan perlengkapan serta inventarisasi benda dan barang kebutuhan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Sekretariat dibantu beberapa urusan bagian yang terdiri dari bagian program, umum dan perlengkapan, Sub Bagian Kepegawain dan keuangan.
3. Bidang pendataan, penetapan dan keberatan mempunyai tugas bantu kepala dinas melaksanakan pendataan dan pentapan, pemeriksaan data serta dokumentasi. dalam melaksanakan tugasnya dibidang ini di bantu oleh dua seksi yaitu seksi pendataan, penatapan dan seksi keberatan
4. Bidang Pajak, Retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penatausahaan penerimaan Pajak dan Retribusi serta pendapatan asli daerah lainnya dalam melaksanakan tugasnyabidang ini dibantu oleh seksi pajak, seksi retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya.
5. Bidang Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pembukuan dan verifikasi, perhitungan retribusi serta pelaporan. Dalam hal ini tugasnya bidang ini dibantu oleh seksi pembukauan dan verifikasi, serta seksi pelaporan dan restitusi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bidang dana perimbangan yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengelola dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Bidang ini memiliki dua seksi yaitu seksi pajak bumi dan bangunan, non pajak dan seksi dana perimbangan
7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas UPTD yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan yang terdiri dari:
 - a. UPTD Tempuling
 - b. UPTD Tanah Merah (Wil. Kerja: Tanah Merah dan Enok)
 - c. UPTD Kuala Indragiri
 - d. UPTD GAS (Wil. Kerja : Gas dan Batang Tuaka)
 - e. UPTD Gaung
 - f. UPTD Reteih
 - g. UPTD Keritang (Wil. Kerja: Keritang dan Kemuning)
 - h. UPTD Mandah
 - i. UPTD Kateman (Wil. Kerja: Kateman, Pulau Burung, Teluk Balengkong dan Pelangeran)
 - j. UPTD Tembilah